

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa perubahan status Perguruan Tinggi mengakibatkan perubahan pada mekanisme tata kelola terhadap Perguruan Tinggi. Salah satunya yaitu berubahnya PTNBLU menjadi PTNBH. Status PTNBH memberikan kewenangan kepada Perguruan Tinggi untuk mengelola dan mengembangkan dirinya secara mandiri. Sehingga PTN yang berstatus PTNBH mencoba mengembangkan tata kelolanya sendiri dengan cara mengadopsi tata kelola dari sektor privat. Namun terdapat banyak perbedaan antara sektor privat dan sektor publik yang mengakibatkan tidak semua aturan dan kebijakan dari sektor privat dapat diadopsi oleh PTN-BH. Hal ini sejalan dengan perspektif *New Public Management* yang menunjukkan bahwa dalam menjalankan sektor publik menggunakan pendekatan sektor privat dan pendekatan bisnis.

Berubahnya Universitas X dari PTNBLU menjadi PTNBH mengakibatkan adanya perubahan pada struktur organisasi utama Universitas X yang saat ini terdiri atas MWA, Rektor dan Senat. Setelah Universitas X menjadi PTNBH sampai saat ini masih belum sepenuhnya menerapkan seluruhnya pola PTNBH. Karena Universitas X masih melakukan penyesuaian pola PTNBH secara bertahap dengan masih banyak perubahan yang terjadi pada sistem atau aturan yang ditetapkan salah satunya pada tata kelola keuangan Universitas. Adanya tata kelola yang baru pada pengelolaan keuangan mengakibatkan adanya penyesuaian

standar akuntansi dari Standar Akuntansi Pemerintah menjadi Standar Akuntansi Keuangan.

Implementasi proses tata kelola keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pengawasan pada Universitas X setelah ditetapkan menjadi PTNBH dilakukan dilakukan secara mandiri. Dimana dalam perencanaan dan penganggaran Universitas X harus menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), pelaporan keuangan hanya dilaporkan pada Rektor dan MWA, dan pengawasan dilakukan oleh SPI dan Komite Audit. Pada proses pelaporan, PTNBH menyusun dan menyajikan laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan. Pada proses pengawasan SPI dapat melakukan reviu, audit atau evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang non akademik, dan komite audit mengawasi atau melakukan supervisi proses audit internal dan audit eksternal atas pengelolaan non akademik, melaksanakan fungsi pemantauan resiko dan menyampaikan laporan tahunan kepada MWA. Hal tersebut menunjukkan adanya keterlibatan peran dan wewenang berbagai unit penting struktur organisasi.

Selain itu ada beberapa fenomena lain yang muncul akibat perubahan Universitas X menjadi PTNBH, yang mengakibatkan beberapa praktik dalam proses tata kelola keuangan belum berjalan efektif. Hal ini diakibatkan pertama oleh aliran informasi dokumen dan komunikasi yang masih lambat antar unit organisasi seperti dalam penetapan anggaran

membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua, struktur organisasi belum dapat menjalankan budaya kerja dengan baik karena masih kurangnya pemahaman terkait pola PTNBH. Ketiga, adanya keterbatasan regulasi atau peraturan yang masih mengalami perubahan akibat penyesuaian dengan pola PTNBH. Keempat, kurangnya SDM mengakibatkan unit tidak dapat menjalankan fungsi dan wewenang dengan baik, sehingga dalam proses pengawasan tidak dapat mengumpulkan dokumen pendukung yang lengkap.

Untuk dapat meningkatkan efektivitas mekanisme tata kelola keuangan pada PTNBH disarankan perlu ditetapkan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan lebih cepat dalam pengindistribusian dokumen informasi terkait anggaran, diperlukan program pelatihan dan sosialisasi secara insentif untuk seluruh pegawai tentang pola tata kelola PTNBH yang mencakup otonomi keuangan. Selain itu, perlu menyusun dan menyesuaikan regulasi internal sesuai dengan pola PTNBH, melakukan evaluasi dan pembaharuan regulasi secara berkala, merekrut dan mengembangkan SDM agar setiap unit memiliki personel yang kompeten untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya secara efektif.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu hasil penelitian hanya menggambarkan bagaimana mekanisme tata kelola keuangan pada PTNBH dari satu perspektif saja.

Proses tata kelola keuangan pada Universitas X tidak bisa menunjukkan gambaran tata kelola yang sama pada Universitas lain yang berstatus PTNBH. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menganalisis keseluruhan proses tata kelola pada universitas, serta melakukan perbandingan dengan tata kelola pada perguruan tinggi yang lain berstatus PTNBH sehingga dapat menunjukkan gambaran bagaimana tata kelola pada PTNBH pada setiap PTN.

